

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Singkat Lokasi Penelitian

Desa Dawuhan terletak di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, dengan luas wilayah 1100,116 Ha, tinggi tempat 500 meter dari permukaan air laut.

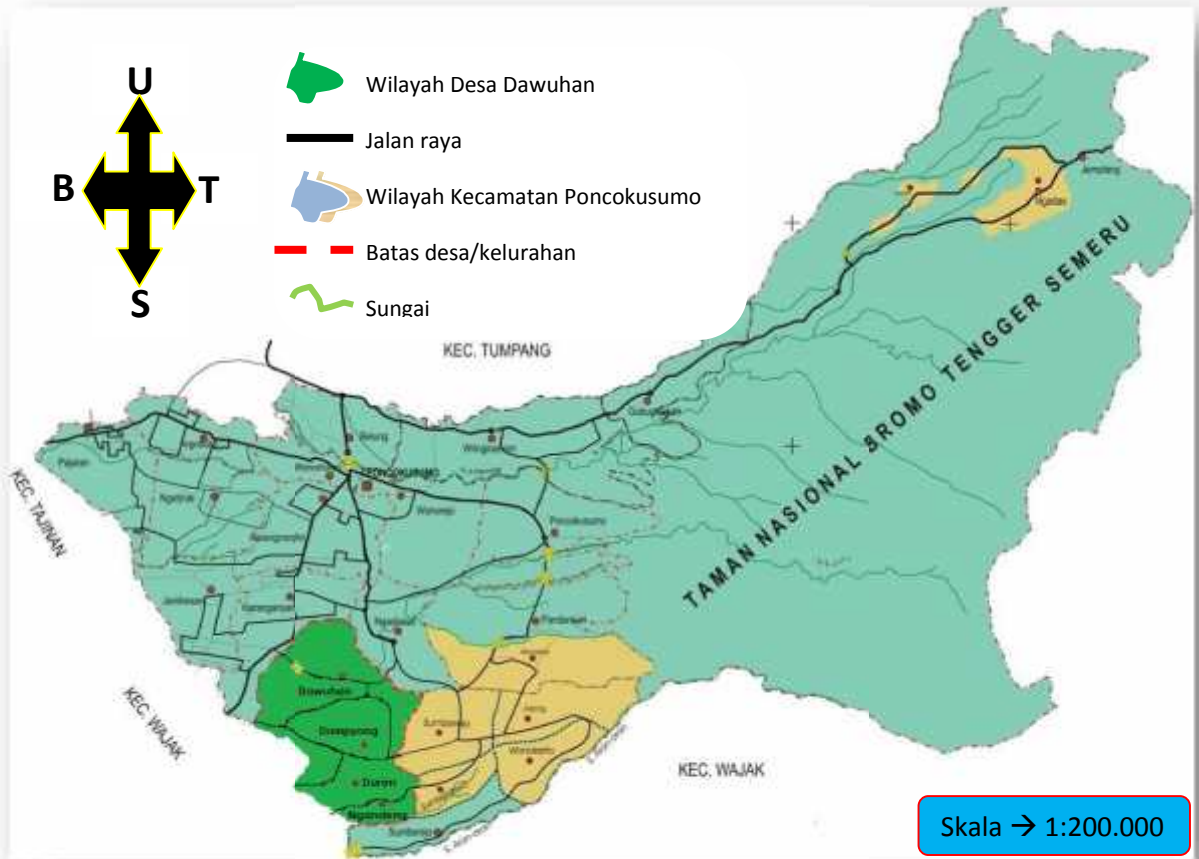
Desa Dawuhan memiliki 5 dusun yaitu :

- Dusun Dawuhan Krajan : 21 RT dan 4 RW.
- Dusun Lesti : 10 RT dan 4 RW.
- Dusun Dompjong : 7 RT dan 2 RW.
- Dusun Duren : 5 RT dan 1 RW.
- Dusun Ngandeng : 9 RT dan 3 RW.

Jika dari balai desa, jarak tempuh ke ibukota kecamatan 7 Km, lama tempuh, 20 menit, jarak ke ibukota kabupaten 28 km, lama tempuh 60 menit.

Batas-batas wilayah

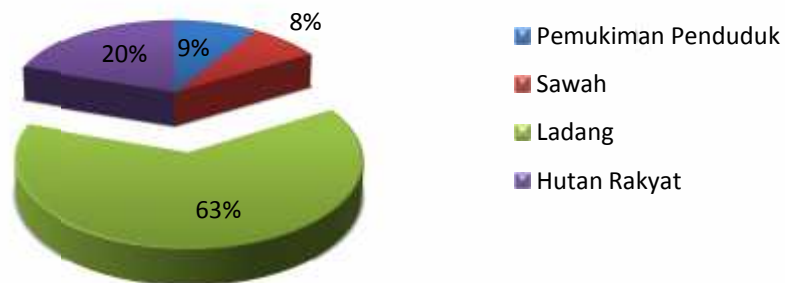
- Sebelah Utara : Desa Ngadireso
- Sebelah Selatan : Desa Patok Picis, Kec.Wajak
- Sebelah Timur : Desa Sumberejo
- Sebelah Barat : Desa Karanganyar



Gambar 4.1.1 : Peta Desa Dawuhan  
 Sumber : Data Umum Kecamatan Poncokusumo

Jumlah penduduk terdiri dari 1700 KK, dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 4139 jiwa, dan perempuan 4098 jiwa, sedangkan jumlah keluarga miskin sebesar 782 KK.

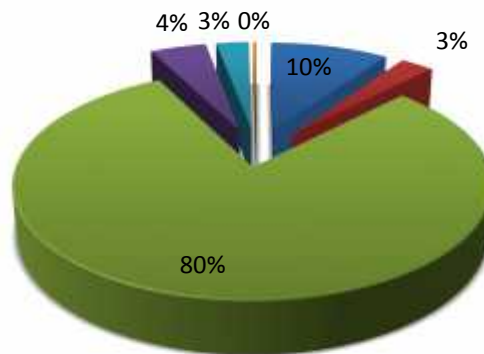
### Prosentase Kondisi Geografis dan Sumberdaya Alam



Gambar 4.1.2 : Kondisi Geografis dan Sumber Daya Alam  
 Sumber : Data Umum Desa Dawuhan

### Prosentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

■ Tidak/Belum Sekolah ■ TK ■ SD ■ SLTP ■ SLTA ■ Perguruan Tinggi



Gambar 4.1.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
 Sumber : Data Umum Desa Dawuhan

Tabel 4.1.1 : Mata Pencaharian Penduduk

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	1557
Buruh tani	1578
Pegawai desa	13
Pegawai Negeri Sipil	10
Guru Swasta	10
Pensiunan ABRI/Sipil	6
Pedagang	150
Persewaan	3
Penjahit	15
Pengrajin	253

Sumber : Data Umum Desa Dawuhan

Tabel 4.1.2 : Sarana dan Prasarana

Sarana Dan Prasarana	Jumlah/Luas
Masjid	7
Musholla	22
Sekolah	8
Polindes	1
Took/Kios	38
Jalan Aspal	3 km
Jalan Paving	3 km
Jalan Tanah	7.5 km
Jalan Macadam	6.5 km
Jembatan	3

Sumber : Data Umum Desa Dawuhan

## 4.2 Penyajian Data Fokus

### 4.2.1 Pembentukan Kelompok Usaha Bersama

#### a. Tahap Persiapan

Menurut pemaparan dari Ibu Dewi Irawati selaku Seksi Bantuan Dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Malang yang diperoleh peneliti dalam wawancara yang dilakukan pada Kamis 7 Juni 2012, pukul 14.00 WIB,



menerangkan bahwa didalam persiapan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh dinas atau instansi terkait adapun kegiatan tersebut yang pertama adalah :

1. **Penyuluhan Sosial.** Penyuluhan sosial merupakan suatu kegiatan penerangan tentang pemberdayaan dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dilaksanakan secara lisan, tertulis, maupun melalui peragaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan membangkitkan kesadaran serta motivasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk mengembangkan pengelolaan Usaha Ekonomi Produktifnya (UEP).

Karena pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Dawuhan adalah sebagai akibat dari Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) tahun 2009, maka pada penyuluhan sosial memerlukan waktu yang tidak singkat yaitu kurang lebih selama satu minggu. Penyuluhan sosial ini dilakukan selama 30 menit, seusai mereka bekerja sekitar pukul 16.00 WIB, penyuluhan tersebut berlokasi dibalai desa dawuhan dengan melibatkan kepala desa, jika kepala desa tidak berkenan hadir maka diwakilkan oleh perangkat desa, dan juga pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

2. **Orientasi dan Observasi.** Merupakan kegiatan pengamatan secara umum sebagai cara pengumpulan data dengan melihat budaya, adat kebiasaan, potensi dan sumber-sumber yang dimiliki oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk dikembangkan dalam kegiatan pemberdayaan.

Sedangkan untuk tahap orientasi dan observasi, dilakukan sebelum, pada saat penyuluhan sosial berlangsung dan setelahnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah kegiatan pendampingan serta dapat dijadikan dasar sebagai solusi jika Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mengalami masalah berkaitan dengan pengembangan Usaha Ekonomi Produktifnya (UEP) nanti. Disamping itu kegiatan orientasi dan observasi juga berfungsi sebagai acuan untuk program-

program pemerintah sebagai penunjang Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM).

## **b. Tahap Pelaksanaan**

### **1. Penjajakan Lokasi dan Pemetaan Kebutuhan**

Melalui wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Jum'at, 8 Juni 2012 pukul 09.15 WIB kepada bapak Bambang Nurhaji selaku pendamping Kelompok Usaha Bersama di Desa Dawuhan didapatkan pernyataan sebagai berikut

“Identifikasi rumah tangga miskin di desa dawuhan untuk Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) yang pertama yaitu pada tahun 2009 dengan menggunakan metode survey yang dilakukan oleh ketua RT dan dibantu beberapa perangkat desa, dimana saat itu terdapat 722 KK miskin. Dari data tersebut di bagi menjadi beberapa kelompok rumah tangga miskin, yaitu rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin dan rumah tangga hampir miskin, data tersebut diserahkan dan diolah lagi dibalai desa dawuhan, bersamaan dengan itu, pihak dari dinas sosial provinsi yang bekerjasama dengan dinas sosial kabupaten melakukan observasi lokasi serta melakukan pengelolaan data warga miskin yang di bagi dalam beberapa kelompok tadi”.

Dari data rumah tangga miskin di Desa Dawuhan, di sebutkan bahwa terdapat 722 KK miskin yang terdiri dari 192 KK sangat miskin, 276 KK miskin dan 254 KK hampir miskin. Namun tidak semua rumah tangga atau KK yang berada dalam kondisi sangat miskin bisa menjadi anggota kelompok usaha bersama, karena menurut perwakilan dari dinas soial bahwa penerima program KUBE ini adalah rumah tangga yang berpotensi untuk melakukan kegiatan produktif.

Untuk menghindari kekurangsiapan dari masyarakat yang akan menjadi anggota Kelompok Usaha Bersama maka Dinas Sosial membentuk Kelompok Binaan Sosial (KBS) atau pra Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dibentuknya

kelompok ini bertujuan untuk mempermudah dan membimbing calon anggota Kelompok Usaha Bersama dalam menjalani aturan main dan pengetahuan didalam sebuah organisasi seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

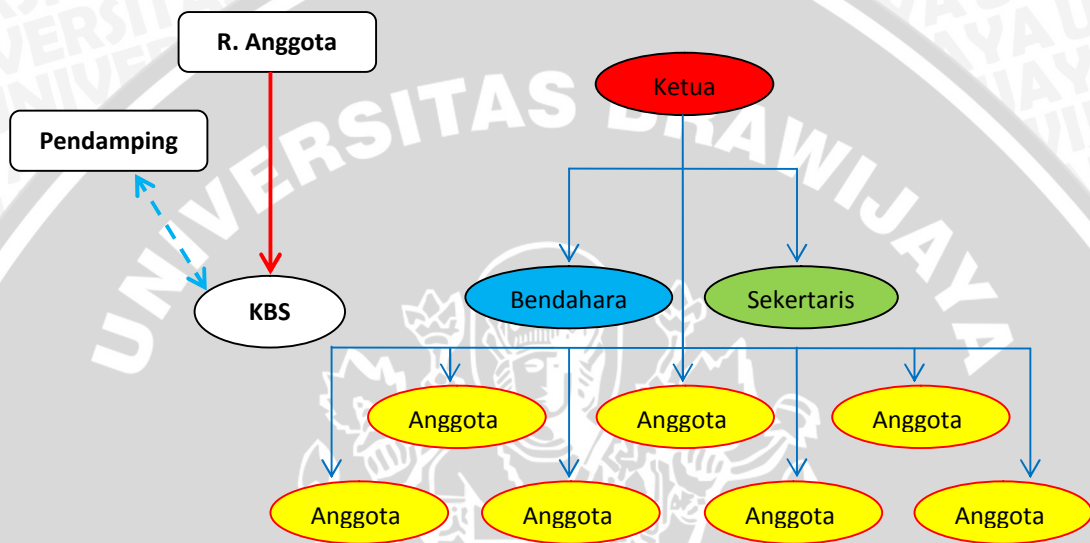


Gambar 4.2.1 : Proses Penjajakan Lokasi Dan Pemetaan Kebutuhan  
Sumber : Dokumentasi Program P2FM-BLPS Desa Dawuhan

Menurut wawancara yang masih tetap dengan bapak Bambang Nurhaji didapatkan pernyataan sebagai berikut

“Setelah Kelompok Binaan Sosial (KBS) terbentuk, maka dinas sosial melakukan sosialisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan mengungkapkan alasan mengapa menggunakan Kelompok Usaha Bersama sebagai media pemberdayaan, kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan selama 3 hari, 1 hari melakukan observasi sebelum pembentukan kelompok binaan sosial dan 2 hari melakukan sosialisasi program setelah kelompok binaan sosial terbentuk, sosialisasi tersebut berlokasi dibalai desa”

Pembentukan kelompok Binaan Sosial disini mengikuti petunjuk dari buku pedoman pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin, dimana struktur organisasi kelompok usaha bersama terdiri dari 1 ketua, 1 sekretaris, 1 bendahara dan 7 anggota seperti pada gambar dibawah ini



Gambar 4.2.2 : Struktur Organisasi Kelompok Binaan Sosial  
Sumber : Buku Pedoman Pelaksanaan P2FM-BLPS

Berdasarkan gambar di atas bahwa keputusan tertinggi berdasarkan rapat anggota, dan fungsi pendamping adalah sebagai pembimbing, dimana didalam pelaksanaannya pendamping tidak berhak didalam menentukan keputusan dari rapat anggota. Didalam kelompok binaan sosial inilah dilakukan pemetaan kebutuhan atau need assesment sebagai langkah awal dari keberlangsungan dan keberlanjutan kelompok usaha bersama nantinya, masih dengan bapak Nurhaji selaku pendamping lapangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di desa Dawuhan memaparkan sebagai berikut

“Di dalam pemetaan kebutuhan ada beberapa hal yang menjadi fokus utama yaitu, jenis usaha apa yang sesuai dengan kondisi masyarakat di desa dawuhan sesuai dengan kondisi alam dan keterampilan anggota

Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yang kedua adalah akses untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan jenis usaha mereka, dan yang terakhir adalah fasilitas selain pendamping yang mereka butuhkan didalam kelompok usaha bersama, misalnya peralatan maupun perlengkapan didalam kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).”

## 2. Bimbingan Sosial Dasar

Adalah suatu kegiatan untuk memberikan motivasi, pengetahuan dan keterampilan, sehingga KUBE memiliki kesiapan untuk mengembangkan usaha dalam pengelolaan dana stimulant UEP dan aktivitas sosial kelembagaan.

Dalam pelaksanaannya peneliti mewawancarai bapak Suliono selaku bendahara KUBE sengkuni pada hari Sabtu, 9 Juni 2012 pukul 15.15 WIB didapatkan pernyataan sebagai berikut

“Beberapa pihak yang terlibat didalam bimbingan sosial dasar ini adalah dinas sosial, beberapa perangkat desa, pendamping baik ditingkat kecamatan maupun di tingkat desa/lapangan, dengan menggunakan Kelompok Binaan Sosial (KBS) sebagai media untuk melakukan bimbingan sosial dasar, adapun kegiatannya adalah menghadapkan kami dalam beberapa masalah berkaitan dengan kelembagaan dan usaha ekonomi produktif yang nantinya akan kami jalani melalui beberapa pertanyaan yang dibuat oleh pihak dari dinas sosial dan beberapa tokoh masyarakat setempat, didalam penyelesaian atau pencarian solusi permasalahan tersebut kami dibantu oleh pendamping desa/lapangan, hal diatas dilakukan untuk mengembangkan pola pikir kami dan meningkatkan keterampilan kami”

Sedangkan hasil dari kegiatan tersebut adalah dapat diketahui dari sekian banyaknya kelompok binaan sosial (KBS), kelompok manakah yang berhak mendapatkan bantuan stimulant tanpa dibimbing lebih intensif lagi, kelompok mana yang masih harus dibimbing secara lebih intensif, serta kelompok mana yang gagal mendapatkan bantuan atau belum cukup layak untuk mendapatkan bantuan stimulant. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya



kegagalan yang berasal dari faktor internal atau Kelompok Usaha Bersama (KUBE) itu sendiri.

### c. Tahap Penyerahan Bantuan

#### 1. Sosialisasi Sistem Usaha Ekonomi Produktif (UEP KUBE)

Sebelum penyerahan bantuan dilakukan kembali lagi Dinas Sosial, beserta kepala desa/beberapa perangkat desa, tokoh masyarakat setempat dan pendamping tingkat kecamatan/desa memberikan sosialisasi yang terakhir tentang sistem yang di terapkan didalam Usaha Ekonomi Produktif KUBE , yaitu :

- (a) **Sistem Bagi Hasil.** 70% individu/anggota, 30% kas kube dalam nominal rupiah
- (b) **Kas KUBE.** Merupakan hak milik kelompok bukan individu, penggunaannya juga untuk kepentingan kelompok
- (c) **Sistem Bergulir.** Bantuan awal adalah 3 ekor sapi, untuk 1 kelompok yg terdiri dari 10 orang , jadi 3 ekor hanya dirawat oleh 3 orang, 7 orang menunggu giliran untuk merawat. Ketika sudah berkembang biak maka 3 ekor sapi yang menjadi modal awal diserahkan/diawat oleh 3 dari 7 orang sisanya, sedangkan hasil dari pengembangbiakan sapi yg pertama adalah milik sepenuhnya individu/anggota yang merawat sebelumnya, jika dinominalkan, harga sapi anak an sebesar 500.000 maka 30% dari 500.000 tersebut masuk kedalam kas kube, sedangkan 70% dari 500.000 tadi adalah milik individu/anggota, dimana penggunaannya juga diserahkan sepenuhnya kepada tanggung jawab individu masing-masing.
- (d) **Bantuan Lanjutan.** Bantuan dana sebesar 30.000.000 melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) yang disediakan untuk beberapa kube yang memenuhi criteria seleksi, tujuannya dimaksudkan selain untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif juga untuk mengembangkan kelembagaan kelompok usaha bersama, dimana pemanfaatannya harus melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan pemerintah sesuai yang tertera di buku pedoman.

#### 2. Mekanisme penyerahan bantuan

Sementara untuk mekanisme penyerahan bantuannya peneliti mewawancarai bapak Nardi selaku pendamping kecamatan pada Senin, 11 Juni 2012 pukul 10.00 WIB dan didapatkan pernyataan sebagai berikut

“Penyerahan bantuan stimulant atau modal usaha, diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama secara langsung oleh dinas sosial berupa hewan ternak yaitu sapi, yang berjumlah 3 ekor untuk masing-masing kelompok usaha bersama yang berjumlah 10 orang dimana saat itu terbentuk sebanyak 30 kelompok usaha bersama di desa dawuhan”

Sedangkan pada tahap program BLPS, pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak jauh berbeda dengan pembentukan yang pertama yaitu pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM), hanya saja disini tidak ada lagi Kelompok Binaan Sosial (KBS) karena Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sudah terbentuk. Namun ada beberapa perubahan dalam anggota kelompok dikarenakan ada anggota yang keluar dan ada anggota baru yang masuk. Sedangkan pada Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) partisipasi anggota KUBE meningkat, hal ini terbukti dengan adanya beberapa pertanyaan dan usulan tentang inovasi pengembangan usaha yang mereka jalani. Sementara itu untuk mekanisme pembentukan kelompok usaha bersama program BLPS peneliti mewawancarai bapak Bambang Nurhaji selaku pendamping Kelompok Usaha Bersama di Desa Dawuhan pada Senin, 11 Juni 2012 pukul 15.15 WIB dan didapatkan pernyataan sebagai berikut

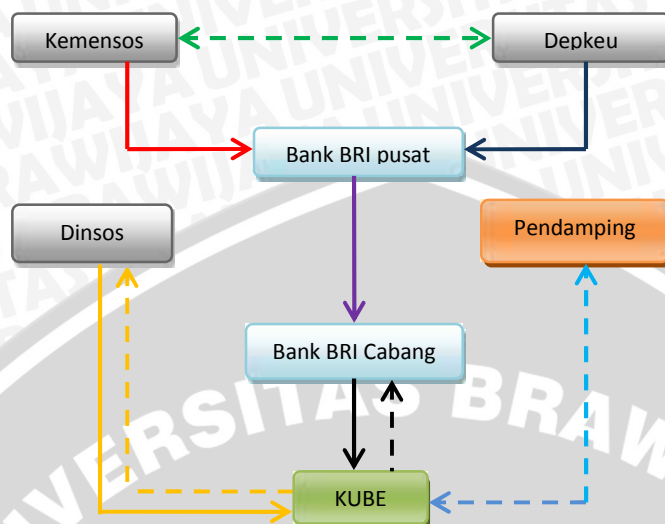
“Jadi 30 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang telah terbentuk pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) sebelumnya diseleksi ulang oleh Dinas Sosial Kabupaten yang prosesnya hampir sama dengan program pemberdayaan fakir miskin, dari 30 kelompok usaha yang terbentuk dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM), dipilih maksimal 10 kelompok untuk mendapatkan atau menerima program bantuan langsung pemberdayaan sosial, dengan syarat yang pertama adalah penambahan modal minimal 30 persen dari modal awal, yang kedua adalah komitmen anggota kelompok yang bisa dilihat dari laporan pertemuan rutin anggota dan perkembangan organisasi hal tersebut semua terangkum dalam laporan kegiatan pendampingan”

Pada awal Februari 2011 tanggal 5-6 diadakan kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan identifikasi dan seleksi, pihak yang terlibat diantaranya adalah pendamping desa, pemerintah desa, kamsil kesos kecamatan dan dinkes kabupaten malang, hasil yang didapatkan adalah sebanyak 10 kelompok dari sebanyak 30 KUBE yang telah terbentuk sebelumnya pada tahun 2009, 10 kelompok yang terpilih menerima program bantuan langsung pemberdayaan sosial kemudian ditetapkan oleh kepala dinas sosial kabupaten malang melalui surat keputusan nomor 180/04/KEP/421.104/2011 pada tanggal 28 februari 2011.

Berbeda dengan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM), pada Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS), bantuan berupa dana sebesar 30.000.000 rupiah untuk masing-masing Kelompok Usaha Bersama, oleh karena itu diwajibkan bagi tiap-tiap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) agar membuat proposal pencairan dana yang berisi tentang pemanfaatan dana BLPS yang diserahkan terlebih dahulu kepada dinas sosial kabupaten untuk mendapatkan persetujuan, yang kemudian di verifikasi di cabang bank BRI terdekat.

Sementara itu, ketika peneliti mewawancarai bapak Slamet Sugianto selaku ketua KUBE Sengkuni pada hari Jum'at, 15 Juni 2012 pukul 18.45 WIB berkaitan dengan proposal pemanfaatan dana bantuan langsung pemberdayaan sosial, didapatkan pernyataan sebagai berikut

“Pada tanggal 22-25 agustus 2011 kami didampingi oleh bapak Bambang Nurhaji selaku pendamping desa membuat proposal pencairan dana tahap pertama didalam proposal tersebut berisi profil masing-masing Kelompok Usaha Bersama, maksud dan tujuan, rincian pemanfaatan dana bantuan, pihak yang terlibat didalam pembuatan proposal adalah masing-masing pengurus KUBE dan pendamping desa”



Gambar 4.2.3 : Mekanisme penyerahan Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial  
 Sumber : Buku pedoman pelaksanaan program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial

**Keterangan**

- Garis → : Surat Perintah Dari Kemensos Kepada Bank BRI Pusat
- Garis → : Persetujuan Proposal Pemanfaatan Dana BLPS
- Garis ←- - - - -> : Koordinasi Pendamping Lapangan Dengan KUBE
- Garis - - - - -> : Pengajuan Proposal Pemanfaatan Dana BLPS
- Garis → : Surat Perintah Pencairan Dana BLPS Kepada Bank BRI Pusat
- Garis → : Pencairan Dana BLPS Oleh KUBE
- Garis - - - - -> : Verifikasi Proposal Pemanfaatan Dana BLPS
- Garis ←- - - - -> : Koordinasi Kemensos Dan Depkeu
- Garis → : Surat Perintah BRI Pusat Kepada BRI Cabang

**4.2.2 Pengembangan Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama**

Didalam pengembangan kapasitas anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ada beberapa hal yang menjadi fokus utama peneliti yang pertama adalah masalah keanggotaan, dimana usia anggota kelompok usaha bersama haruslah dalam usia produktif yaitu antara 15-55<sup>th</sup> karena adanya Usaha Ekonomi Produktif (UEP) maka anggota KUBE haruslah produktif, dan memiliki komitmen untuk mewujudkan dan mengembangkan visi dan misi kelompok, dalam hal ini menurut wawancara kepada bapak Slamet Sugianto selaku ketua KUBE Sengkuni pada hari Sabtu, 16 Juni 2012 pukul 17.00 WIB didapatkan pernyataan sebagai berikut



“Untuk keanggotaan memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi mas, sesuai dengan ketentuan buku pedoman dari pemerintah (Dinas Sosial) anggota harus berumur antara 15-55<sup>th</sup>, memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk mengembangkan kelompok, serta membayar iuran wajib sebesar 20.000 rupiah pada saat pertama kali masuk.”

Disamping keanggotaan hal yang perlu diperhatikan adalah kepengurusan dan pembagian tugas, proses pengambilan keputusan, intensitas pertemuan anggota dan yang terakhir adalah Administrasi Kelompok Usaha Bersama.

#### **a. Kepengurusan dan Pembagian Tugas**

Kepengurusan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Dawuhan terdiri atas seorang ketua, seorang sekertaris, seorang bendahara dan dan tujuh orang anggota dimana masing-masing jabatan memiliki peranan atau tugas dan fungsinya. Menurut wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Nakrowi selaku sekertaris KUBE Sengkuni pada hari Sabtu, 16 Juni 2013 pukul 20.15 WIB berkaitan dengan pembagian tugas didapatkan pernyataan sebagai berikut

“Ada 8 hak dan kewajiban seorang ketua kelompok, yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap rapat kelompok, memimpin dan bertanggung jawab atas kelangsungan KUBE, memimpin seluruh kegiatan kelompok, membimbing, mengawasi dan mengarahkan sekertaris dan bendahara kelompok, mengambil keputusan sesuai dengan kebijaksanaan dan hasil musyawarah kelompok, membagi tugas atau menguasai anggota untuk melaksanakan sesuatu yang menyangkut kepentingan kelompok, memeriksa dan menutup buku kas serta memeriksa catatan administrasi lainnya, dan yang terakhir melaporkan perkembangan KUBE secara berkala kepada anggota KUBE”

Adapun hak dan kewajiban seorang sekertaris diantaranya adalah :

1. Membantu ketua dalam melaksanakan administrasi
2. Mewakili ketua apabila berhalangan
3. Mengundang rapat kelompok atas perintah ketua kelompok
4. Mencatat hasil keputusan rapat kelompok
5. Mengumumkan hal-hal yang perlu di ketahui oleh anggota
6. Menyusun laporan untuk rapat kelompok
7. Mengisi buku-buku administrasi kelompok

8. Membantu ketua dalam memimpin kegiatan kelompok

Adapun hak dan kewajiban seorang bendahara yaitu :

1. Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang KUBE
2. Menyimpan segala penerimaan/ keuangan kelompok
3. Membayar dan mengeluarkan uang untuk suatu keperluan yang telah di setujui oleh ketua
4. Membuat buku catatan pembantu tentang usaha ekonomi produktif kelompok
5. Melaporkan keadaan keuangan KUBE dalam rapat kelompok

Berkaitan dengan hak dan kewajiban anggota, masih dengan Bapak Nakrowi selaku sekertaris KUBE Sengkuni didapatkan pernyataan sebagai berikut,

“Secara umum kewajiban anggota adalah mengikuti pertemuan rutin setiap bulan, membayar iuran kesetiakawanan sosial, mengikuti kegiatan-kegiatan KUBE, sedangkan hak anggota adalah berpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan namun jika ada kewajiban-kewajiban dan hak-hak khusus lainnya hal itu tergantung dari keputusan dari masing-masing kelompok, misalnya didalam kelompok kami jika ketua tidak bisa hadir dalam pertemuan kelompok maka anggota yang dipercaya bisa menggantikan posisinya sementara, sedangkan di kelompok lainnya yang menggantikan adalah sekertaris atau biasanya bendahara kelompok”

Menurut pernyataan dari Bapak Nakrowi diatas pembagian tugas pada tahap program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial sudah mulai mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pembagian tugas yang bersifat sangat sederhana yang ada pada tahap Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari bapak Parsam selaku anggota kelompok usaha bersama Sengkuni melalui wawancara yang dilakukan peneliti pada Minggu, 17 Juni pukul 13.00 WIB yang menyatakan bahwa

“Karena pada saat pertama kali kami mendapat bantuan yang pertama melalui program pemberdayaan fakir miskin tahun 2009, dan pada saat itu KUBE juga pertama kali dibentuk, maka kami pada saat itu tidak terlalu fokus dalam masalah kelembagaan kelompok terutama masalah pembagian tugas dan administrasi kelompok, hal pertama yang kami fokuskan hanyalah Usaha Ekonomi Produktif”

Didalam kepengurusan dan pembagian tugas ada satu hal yang sangat penting yaitu pemahaman serta kesadaran dari seluruh anggota dan pengurus KUBE sehingga tugas pokok dan fungsi dari masing-masing anggota dan pengurus berjalan dengan semestinya, berkaitan dengan hal ini peneliti mewawancarai bapak Saikan Selaku anggota KUBE Sengkuni pada hari Minggu 17 Juni 2012 pukul 13.00 WIB dan didapatkan pernyataan sebagai berikut

“Pada awal pembentukan tidak semua anggota benar-benar memahami dan menyadari tentang tugas dan fungsinya sebagai anggota atau bisa dikatakan mereka berjalan sesuai dengan perintah dan panduan dari berbagai pihak, seperti pendamping, pemerintah (Dinas Sosial), serta dari buku panduan, namun seiring berjalannya waktu mereka terus belajar dan berusaha memahami tentang kelompok usaha bersama hingga saat ini sebagian besar dari anggota sudah mampu memahami tentang kepengurusan dan pembagian tugas, tujuan dan struktur kelompoknya masing-masing.”

#### **b. Administrasi Kelompok**

Didalam suatu organisasi tidak terlepas dari pembukuan atau laporan-laporan atau catatan-catatan berkaitan dengan keuangan,serta hal-hal lain yang erat kaitannya dengan perkembangan organisasi atau kelompok tersebut. Begitu juga kelompok usaha bersama di desa dawuhan ini, berkaitan dengan permasalahan administrasi kelompok peneliti mewawancarai bapak Kalek selaku ketua kelompok Usaha bersama Sugriwa pada hari Senin, 18 Juni 2012 pukul 13.15 WIB peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan administrasi kelompok usaha bersama dan didapatkan pernyataan sebagai berikut

“Untuk administrasi Kelompok Usaha Bersama haruslah memiliki yang pertama adalah Buku rencana kegiatan, kartu pengembangan kesejahteraan anggota KUBE, kemudian buku penerimaan bantuan KUBE, buku kas (pengeluaran dan penerimaan), buku pengembangan UEP KUBE, buku pengembangan hasil UEP KUBE, kartu pengembangan

kesejahteraan anggota KUBE, buku tamu dan buku anggota, namun untuk sebagian besar Kelompok Usaha Bersama di desa dawuhan sementara ini hanyalah memiliki buku kas, buku anggota, dan buku pengembangan hasil UEP KUBE”

Masih dengan bapak Kalek selaku ketua KUBE Sugriwa peneliti mempertanyakan mengapa kelompok usaha bersama di desa dawuhan hanya memiliki beberapa catatan-catatan atau laporan-laporan yang kurang dari semestinya, dan didapatkan pernyataan sebagai berikut

“Kurangnya beberapa buku atau catatan tersebut dikarenakan tidak semua bendahara kelompok bisa menulis dengan baik, ada beberapa kelompok dimana sekertaris membantu kinerja dari bendahara dalam masalah pencatatan keuangan meskipun demikian dari sekian banyaknya catatan dan laporan ada yang perannya sangat vital bagi kelompok seperti buku kas, buku anggota dan buku pengembangan hasil Usaha Ekonomi Produktif, ketiga buku tersebut setiap kelompok diwajibkan untuk memiliki”

### **c. Proses Pengambilan Keputusan**

Setelah kepengurusan dan pembagian tugas atau hal-hal yang meliputi struktur kelompok usaha bersama dan administrasi kelompok hal terpenting selanjutnya yang perlu diperhatikan atau mendapat fokus adalah proses pengambilan keputusan didalam suatu kelompok. Didalam hal ini kelompok usaha bersama menggunakan prinsip musyawarah mufakat untuk mendapatkan kesepakatan dalam setiap pengambilan keputusan dalam berbagai hal, baik itu mengenai usaha ekonomi produktif maupun dalam hal kelembagaan. Seperti yang diungkapkan bapak Sukeno selaku sekertaris KUBE Sugriwa dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Senin, 18 Juni 2012 pukul 14.15 WIB mengenai proses pengambilan keputusan, maka didapatkan pernyataan sebagai berikut

“Partisipasi dari masing-masing anggota kelompok sangat diperlukan didalam setiap pertemuan, baik dalam pertemuan rutin maupun



pertemuan-pertemuan lainnya. Pentingnya partisipasi anggota dalam hal ini dikarenakan kelompok usaha bersama di desa dawuhan menggunakan prinsip musyawarah mufakat”



Gambar 4.2.2 : Musyawarah Anggota Kelompok Usaha Bersama  
Sumber : Dokumentasi P2FM-BLPS Desa Dawuhan

Sesuai dengan uraian bapak Sukeno selaku Bendahara KUBE Sugriwa bahwa didalam proses pengambilan keputusan sangat diperlukan adanya partisipasi dari anggota kelompok, maka dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah tingkat partisipasi anggota kelompok, karena hal ini sangat mempengaruhi keputusan yang akan diambil nantinya, hal ini juga mempengaruhi proses kedewasaan berfikir masing-masing anggota kelompok usaha bersama. Didalam setiap proses pengambilan keputusan terjadi proses pembelajaran juga bagi setiap anggota kelompok usaha bersama di desa dawuhan.

#### **4.2.3 Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama**

Karena tujuan utama dari program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial ini adalah untuk menyejahterakan anggota Kelompok Usaha Bersama atau masyarakat penerima bantuan, oleh sebab itu maka hal terpenting selain permasalahan kelembagaan adalah usaha atau jenis kegiatan ekonomi seperti apa yang dijalankan oleh kelompok usaha bersama tersebut. Sehingga semakin jelas bahwa ada beberapa hal yang perlu untuk diteliti yang pertama adalah masalah

sumber permodalan dan sistem seperti apa yang dipergunakan oleh kelompok usaha bersama, kemudian bagaimana pengembangan keterampilan teknis dan manajerial anggota kelompok usaha bersama, peluang pasar, kemudian berkaitan dengan tabungan apakah tabungan bersifat individu atau ada tabungan kelompok, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan kemitraan atau kerjasama antar kelompok usaha bersama dengan berbagai pihak, baik itu dengan pemerintah, maupun dengan pihak-pihak yang lainnya.

#### **a. Sumber Permodalan dan Sistem KUBE**

Dalam usahanya untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif, sebelum adanya Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial atau masih dalam kerangka Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Kelompok Usaha Bersama di desa dawuhan, berkaitan dengan sistem seperti apa yang digunakan oleh Kelompok Usaha Bersama dalam pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi produktifnya maka peneliti mewawancarai bapak Sakrip selaku ketua kelompok usaha bersama Pandu pada hari Senin, 18 Juni 2012 pukul 15.15 WIB dan didapatkan pernyataan sebagai berikut

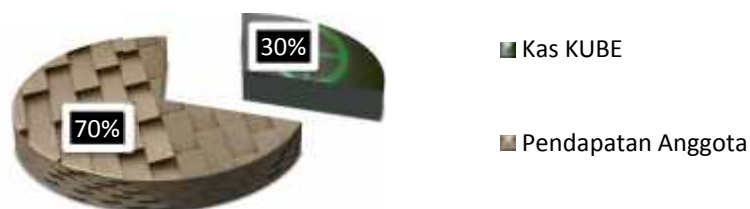
“Sistem yang digunakan KUBE semenjak pada program pemberdayaan fakir miskin hingga saat ini adalah sistem bagi hasil dengan mekanisme pengguliran, artinya di sini bantuan stimulant yang diterima dari dinas sosial provinsi berupa hewan ternak yang berjumlah 3 ekor untuk masing-masing kelompok yang berjumlah 10 orang di gulirkan, pengguliran disini ialah perawatan hewan ternak oleh masing-masing anggota hingga hewan ternak tersebut berkembang biak, jika sudah berkembang biak maka hewan ternak pertama akan digulirkan ke anggota lain yang belum menerima modal, untuk dikembangbiakkan.”

Masih dengan bapak Sakrip peneliti mewawancarai tentang bagaimana sistem bagi hasil tersebut diterapkan dan didapatkan pernyataan sebagai berikut

“Jadi bagi hasil didalam kelompok usaha bersama di desa dawuhan ini adalah 70% untuk pengelola usaha ekonomi produktif sedangkan sisanya 30% adalah untuk kas KUBE, sistem bagi hasil tersebut berlaku setelah system pengguliran atau setelah masing-masing anggota memiliki modal awal. Sedangkan status kepemilikan usaha ekonomi produktif atau ternak tersebut adalah milik kelompok usaha bersama sepenuhnya, begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian hewan ternak harus sepengetahuan kelompok usaha bersama jika penjualan tersebut berkaitan dengan kas KUBE”

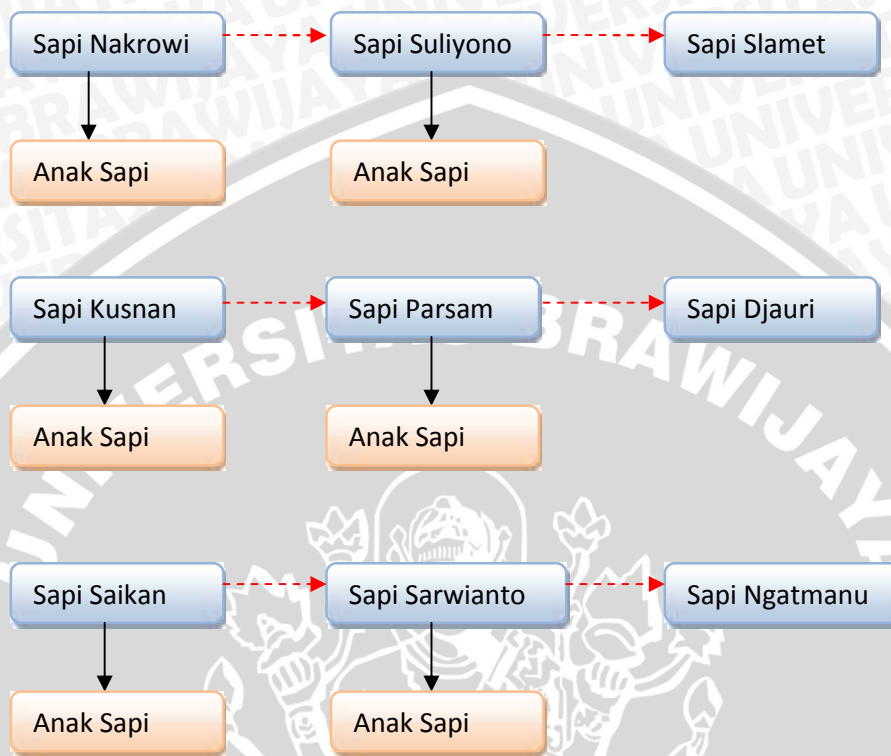
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa modal awal kelompok usaha bersama di desa dawuhan semenjak awal pembentukan atau pada tahap program pemberdayaan fakir miskin adalah berasal dari pemerintah yang berupa 3 ekor sapi yang kemudian di kembangkan dalam bentuk usaha ekonomi produktif berupa ternak sapi. Di dalam pengembangan modal awal mekanisme yang digunakan adalah dengan pengguliran. Sedangkan untuk sumber permodalan untuk tahap program bantuan langsung pemberdayaan sosial adalah berupa dana sebesar Rp 30.000.000 tiap kelompok yang berasal dari pemerintah ditambah dengan modal yang berasal dari pengembangan usaha ekonomi produktif pada tahap Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Berkaitan dengan sistem yang digunakan oleh kelompok usaha bersama adalah sistem bagi hasil dengan perhitungan seperti gambar dibawah ini :

#### Sistem Bagi Hasil KUBE



Gambar 4.2.1 : Sistem Bagi Hasil KUBE  
Sumber : Wawancara Peneliti

### Mekanisme Pengguliran



Gambar 4.2.2 : Mekanisme Pengguliran  
 Sumber : Wawancara Peneliti

Keterangan : Garis —————> Pemilikan Modal  
 Garis - - - - -> Penguliran Modal

Di dalam pengguliran pada tahap program pemberdayaan fakir miskin sistem bagi hasil diberlakukan ketika si perawat sapi dapat mengembiakkan minimal satu ekor sapi, dimana anak sapi dari modal awal adalah sepenuhnya milik si perawat, setelah keadaan tersebut maka system bagi hasil di terapkan kepada si perawat atau anggota kelompok usaha bersama, berbeda dengan tahap program bantuan langsung pemberdayaan sosial, ketika dana sudah dibelikan minimal satu ekor sapi maka sistem bagi hasil sudah di terapkan, meskipun status dari sapi tersebut adalah sama seperti modal awal dari program pemberdayaan fakir miskin.

## **b. Pengembangan Keterampilan Teknis Dan Manajerial**

Didalam pengembangan usaha ekonomi produktif hal terpenting kedua selain modal adalah kemampuan anggota atau pelaku usaha ekonomi produktif dalam mengolah dan mengatur usaha ekonomi produktifnya serta kemampuan atau keterampilan secara teknis yang tentunya berkaitan dengan jenis usaha yang dijalankan. Kelompok usaha bersama di desa dawuhan dalam menjalankan usaha ekonomi produktifnya semenjak masa atau periode program pemberdayaan fakir miskin hingga pada masa program bantuan langsung pemberdayaan sosial belum mengalami perubahan yang signifikan khususnya berkaitan dengan hal yang bersifat pengembangan kemampuan teknis dan manajerial.

Penggunaan tata cara lama dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif merupakan bukti bahwa keterampilan manajerial kelompok usaha bersama kurang berkembang, hal ini didukung oleh pernyataan dari bapak Nakrowi selaku sekertaris kelompok usaha bersama sengkuni dalam wawancara peneliti pada hari Jum'at, 22 Juni 2012 pukul 16.15 WIB

“Karakteristik masyarakat desa dawuhan, terutama buruh tani atau penerima bantuan langsung pemberdayaan sosial yang memiliki tingkat pendidikan rendah, sebagian besar masih kesulitan untuk menerima inovasi yang diberikan oleh pendamping dan anggota lain yang tingkat pendidikan atau pengetahuannya cukup luas”

Dari kutipan wawancara diatas sebenarnya sudah ada kegiatan-kegiatan dari pendamping dan anggota lainnya yang bersedia membantu dalam mengembangkan keterampilan manajerial kelompok usaha bersama, namun dikarenakan tingkat pendidkannya yang rendah sehingga beberapa anggota masih kurang memahami dan masih perlu belajar lagi tentang keterampilan manajerial.

Sedangkan untuk kemampuan teknis dalam pengelolaan Usaha Ekonomi produktif hampir semua anggota kelompok usaha bersama memahaminya dengan baik, karena pada awal pembentukan kelompok usaha bersama penentuan atau pemilihan jenis usaha didasarkan kepada kemampuan masyarakat dan potensi sumberdaya alam di desa dawuhan. Sebagian besar mata pencaharian anggota kelompok usaha bersama sebagai buruh tani selaras dengan jenis usaha ekonomi produktif yang mereka jalankan.

Seperti yang diungkapkan bapak Nakrowi selaku sekretaris KUBE sengkuni dalam wawancara peneliti pada hari Jum'at, 22 Juni 2012 pukul 16.30 WIB

“Sementara ini perawatan atau pengelolaan ternak sapi atau usaha ekonomi produktif sebageian besar kube didesa dawuhan memang masih dilakukan secara individu tidak secara kolektif hal tersebut disebabkan masih belum adanya kandang yang cukup besar untuk sapi-sapi mereka, namun hasil maupun penambahan modal UEP yang cukup signifikan menunjukkan bahwa kemampuan para anggota kube dalam merawat dan mengelola ternak mereka juga baik”

Dari pernyataan bapak Nakrowi diketahui bahwa pengelolaan usaha ekonomi produktif berupa ternak sapi tidak dilakukan secara berkelompok dikarenakan masih belum adanya fasilitas yang memadai sehingga perawatan atau pengelolaan harus dilakukan secara terpisah atau sendiri-sendiri, namun perawatan atau pengelolaan yang dilakukan secara individu bukan berarti tidak baik, hal tersebut terbukti dengan pendapatan anggota yang didapatkan dari usaha ekonomi produktifnya serta penambahan modal usaha.

### **c. Peluang pasar**

Pasar merupakan tempat dimana bertemunya penjual dan pembeli. Dalam hal ini pasar merupakan tempat bagi kelompok usaha bersama menjual atau

menjadikan hasil dari usaha ekonomi produktifnya berupa uang atau benda lainnya yang bisa digunakan untuk keperluan kelompok maupun keperluan individu. Dalam hal ini peran pasar sangatlah penting bagi kelangsungan atau dinamika kehidupan kelompok usaha bersama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Kalek selaku Ketua KUBE Sugriwa dalam wawancara peneliti pada hari Sabtu, 23 Juni 2012 pukul 15.15 WIB

“Untuk sementara ini jenis usaha ekonomi produktif seperti peternakan sapi pedaging peluang pasarnya sangatlah bagus karena banyak dibutuhkan baik untuk acara keagamaan, pernikahan maupun untuk konsumsi yang lainnya, adanya pasar sapi didesa padjaran kecamatan poncokusumo sangatlah membantu proses jual beli, meskipun demikian beberapa anggota lebih memilih untuk menjual atau membeli sapi ke temannya atau kerabatnya sendiri”

Usaha ternak sapi khususnya sapi pedaging seperti yang ada di desa dawuhan memiliki peluang pasar yang bagus dalam hal ini sangatlah mendukung dinamika kehidupan kelompok usaha bersama. Sementara itu, media yang digunakan untuk transaksi jual beli adalah pasar sapi tradisional di desa padjaran, kecamatan poncokusumo dan teman atau kerabat anggota kelompok usaha bersama.

Karena peluang pasar usaha ekonomi produktif kelompok usaha bersama didesa dawuhan yaitu peternakan sapi pedaging cukup bagus ,tetapi permasalahan disini adalah media untuk pemasaran yang terbatas maka ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kelompok usaha bersama sebagai upaya mengembangkan usaha ekonomi produktifnya yaitu

(1) **Kemitraan.** Adalah kegiatan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terutama pihak-pihak yang dapat membantu memfasilitasi kegiatan usaha ekonomi produktif mereka selain pemerintah, dalam hal ini pihak tersebut adalah tokoh masyarakat

didesa dawuhan yang cukup berpengaruh. Disamping itu, kelompok usaha bersama didesa dawuhan juga menjalin kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah berkaitan dengan jenis usaha mereka, seperti dinas peternakan

- (2) **Pendidikan Anggota.** Adalah kegiatan untuk menambah wawasan kepada para anggota kelompok usaha bersama berkaitan dengan hal pemasaran, yaitu tata cara untuk memasarkan produk yang mereka hasilkan dengan cara-cara yang menarik. Diharapkan dengan adanya pendidikan anggota

#### d. Tabungan

Didalam pengembangan usaha ekonomi produktif ada hal yang sangat penting kiranya untuk diperhatikan selain pengembangan keterampilan teknis dan manajerial, peluang pasar dan modal yaitu tabungan. Tabungan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keberlanjutan usaha ekonomi produktif. Berkaitan dengan tabungan kelompok peneliti mewawancarai bapak Tasri selaku Bendahara KUBE Sugriwa pada hari Minggu, 24 Juni 2012 pukul 16.00 WIB, dengan beberapa pertanyaan seperti apakah kelompok usaha bersama didesa dawuhan memiliki tabungan kelompok, seberapa besar jumlahnya bagaimana pengelolaannya maka didapatkan pernyataan sebagai berikut

“Untuk tabungan kelompok sementara ini masih bersifat sederhana, seperti yang ada dalam administrasi kelompok, tiap individu memiliki tabungan yang besarnya 5000 rupiah tiap minggu, sedangkan untuk kelompok diwajibkan 2000 tiap minggu”

Sementara itu untuk pengelolaan tabungan kelompok usaha bersama adalah selain sebagai sarana untuk menambah modal usaha ekonomi produktif juga digunakan untuk pembelian peralatan penunjang kegiatan ekonomi produktif, sedangkan keterangan tentang bagaimana tata cara pemanfaatan tabungan kelompok maka peneliti mewawancarai bapak Samat selaku bendahara kelompok



usaha bersama Sadewo pada hari Minggu, 24 Juni 2012 pukul 16.15 WIB didapatkan pernyataan sebagai berikut

“Seperti pemanfaatan dana bantuan langsung pemberdayaan sosial maka kami disini juga membuat proposal pemanfaatan dana tabungan tetapi disini tidak melalui persetujuan dari dinas sosial tetapi persetujuan dari rapat anggota, dan ini masih baru kami terapkan, berjalan kira-kira 5 bulan yang lalu, yah, itung-itung buat sarana pembelajaran bagi anggota yang lain”

#### **4.2.4 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Proses Pemberdayaan Masyarakat**

##### **Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama**

Berbicara mengenai pemberdayaan masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama tentunya berkaitan dengan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi baik pemberdayaan itu sendiri maupun media pemberdayaan atau Kelompok Usaha Bersama.

##### **a. Faktor Internal**

##### **1. Anggota Kelompok Usaha Bersama**

Anggota kelompok usaha bersama merupakan faktor internal yang tentunya memberikan pengaruh paling besar dalam hal ini, karena merupakan subjek atau pelaku utama didalam proses pemberdayaan. Menurut wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Sabtu, 14 Juli 2012 pukul 16.15 WIB kepada bapak Supa'i selaku ketua KUBE Puntodewo tentang bagaimana perilaku anggota didalam proses pemberdayaan masyarakat ini, dan diperoleh pernyataan sebagai berikut

“Terpilihnya 10 kelompok usaha bersama untuk mendapatkan bantuan lanjutan dari program bantuan langsung pemberdayaan sosial merupakan salah satu perilaku positif yang ditunjukkan oleh anggota kelompok usaha bersama tersebut, hal ini sudah cukup membuktikan bahwa mereka memiliki komitmen untuk merubah nasibnya, meningkatkan keterampilan dan mengembangkan kemampuan mereka untuk berdaya”

Sementara itu masih dengan bapak Supa'i yang melanjutkan pernyataannya

“Sebaliknya 20 kelompok yang tidak terpilih merupakan suatu jawaban bahwa sikap pasif masih melekat didalam jiwa para anggota kelompok usaha bersama tersebut terlebih beberapa kelompok yang malah tidak bisa bertahan atau bubar, sedangkan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan masih simpang siur, bahkan ada yang beberapa kelompok yang tidak perlu saya sebutkan disini lepas tangan, atau dengan kata lain keinginan atau kesadaran untuk merubah nasib sudah tidak ada”

Pernyataan dari bapak Supa'i diatas menunjukkan bahwa perilaku dan cara berfikir anggota kelompok usaha bersama memberikan pengaruh yang cukup besar bagi keberlanjutan kelompok usaha bersama nantinya berkembang atau tidak.

## 2. Pendamping Lapangan

Meskipun bukan sebagai pelaku utama dari pemberdayaan tetapi peran pendamping lapangan cukup besar, bukan hanya sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat yang diberdayakan tetapi juga sebagai *agent of change* didalam masyarakat itu sendiri menurut pemaparan dari bapak Matrokim selaku ketua kelompok usaha bersama Nakula dalam wawancara peneliti pada hari Selasa, 17 Juli 2012 pukul 15.15

“Tidak bisa dipungkiri bahwa prestasi yang diraih oleh kelompok usaha bersama beberapa tahun terakhir juga berkat pembinaan dan pengarahan pendamping, jika pendamping tidak memiliki keluwesan dan ketegasan yang cukup baik maka tidak menolak kemungkinan 10 Kelompok Usaha Bersama di desa dawuhan ini terpilih kembali untuk menerima bantuan lanjutan dari program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)”

Meskipun pendamping lapangan telah di beri materi pelatihan pendamping dalam diklat pendamping di Jogjakarta tetapi tidak menolak kemungkinan bahwa pendamping lapangan tidak memiliki sisi negatif yang dirasa dapat memberikan

pengaruh buruk bagi keberlangsungan kelompok usaha bersama terutama para anggota, seperti yang diungkapkan bapak Nardi selaku pendamping kecamatan pada hari Selasa, 17 Juli 2012 pukul 09.15 WIB

“Mengenai laporan kegiatan dari kelompok usaha bersama yang di buat oleh pendamping lapangan, yang terkesan sangat sederhana dan kurang adanya perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun, tentunya hal ini akan menjadi contoh buruk bagi catatan kegiatan atau administrasi kelompok usaha bersama, baik itu dalam bentuk laporan keuangan ataupun laporan kegiatan”

Pendamping lapangan sesuai perannya didalam pengembangan kelompok usaha bersama yaitu sebagai *agent of change*, maka diharapkan mampu mendayagunakan kemampuan dan keterampilannya dalam memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rangka mengarahkan dan membina kelompok usaha bersama didesa dawuhan tetapi ada permasalahan yang cukup serius dalam hal ini, adalah tenaga pendamping yang dirasa perlu mendapatkan penambahan karena banyaknya kelompok usaha bersama didesa dawuhan ini, menurut pemaparan dari bapak Slamet Sugianto dalam wawancara pada hari Kamis, 2 Agustus 2012 pukul 16.00 WIB didapatkan pernyataan sebagai berikut :

“Jumlah kelompok usaha bersama saya rasa terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah pendamping lapangan, oleh sebab itu pendampingan kurang maksimal dalam hal ini, seharusnya didalam buku panduan program pemberdayaan fakir miskin-bantuan langsung pemberdayaan sosial ini 1 orang mendamping maksimal mendampingi 7-10 kelompok dan sekurang-kurangnya 3-5 kelompok, disamping itu pendamping lapangan tidak boleh berasal dari instansi pemerintah karena dikhawatirkan akan menjadi tidak fokus antara tugas sebagai pendamping dan pekerjaan sehari-harinya”

#### **b. Faktor Eksternal**

Selain faktor internal internal di atas adapun faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan kelompok usaha bersama adalah peran dari

pemerintah dan pengaruh lingkungan baik didalam desa dawuhan maupun diluar desa dawuhan.

### **1. Pemerintah**

Tugas dari pemerintah disini adalah sebagai fasilitator dan penanggung jawab bagi kelompok usaha bersama, didalam menjalankan tugasnya, pemerintah dalam hal ini dinas atau instansi sosial baik provinsi maupun kabupaten/kota bisa menjadi acuan bagi pembelajaran kedewasaan kelompok usaha bersama dalam mengembangkan kelembagaan , sebagaimana dipaparkan oleh bapak Kalek selaku Ketua KUBE Sugriwa dalam wawancara pada hari Selasa, 7 Agustus 2012 pukul 15.15

“didalam melakukan kegiatan-kegiatan kelompok baik yang berkaitan dengan kelembagaan maupun usaha ekonomi produktif, pengetahuan kami pada awalnya berasal dari arahan pemerintah misalnya dalam tata cara pembentukan kelompok binaan sosial, penentuan keputusan berdasarkan rapat anggota hingga jenis usaha ekonomi produktif. Pemerintah dalam hal ini mampu memahami kondisi kami baik dalam segi ekonomi, sosial, maupun pendidikan mereka sangat telaten dan komunikatif”

### **2. Lingkungan**

Faktor eksternal berikutnya adalah lingkungan, dalam hal ini lingkungan pun masih di bagi lagi menjadi 2, yang pertama lingkungan internal atau disekitar desa dawuhan berkaitan dengan permasalahan ini disebutkan juga budaya, sumberdaya baik alam maupun manusia. Kemudian yang kedua adalah lingkungan eksternal yang merupakan segala hal di luar desa dawuhan yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat miskin di desa dawuhan.

Bentang alam didesa dawuhan yang merupakan daerah dataran tinggi menyebabkan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani sayur

dan buah. Namun sebagian besar dari mereka bukanlah pemilik tanah jadi dalam hal ini mereka adalah sebagai buruh tani dari sekelompok masyarakat pemilik modal/lahan. Menurut wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Nakrowi selaku Sekertaris Kube Sengkuni pada hari Selasa, 7 Agustus 2012 Pukul 17.00 didapatkan pernyataan sebagai berikut

“pengelolaan jenis usaha ekonomi produktif kelompok usaha bersama yaitu beternak sapi sebenarnya adalah pekerjaan yang cukup memeras waktu dan tenaga, karena pekerjaan kami adalah sebagai buruh tani, jika dari pagi hingga sore kami bekerja ,maka dari sore sampai petang hari kami mencari pakan untuk ternak kami, oleh karena itu agar tidak menguras tenaga maka jika ada beberapa anggota KUBE yang memiliki anak laki-laki yang kebetulan berdomisili didesa dawuhan atau tidak sedang bekerja di tempat lain maka pengelolaan pengembangan sapi ini diserahkan kepada anak-anak mereka.”

Menurut pemaparan bapak Nakrowi di atas bahwa pekerjaan sebaigian besar anggota Kelompok Usaha Bersama sebagai buruh tani memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif mereka.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Pembentukan Kelompok Usaha Bersama**

Proses pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama didesa dawuhan diawali dengan tahap pengenalan yaitu dengan pembentukan kelompok. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti berkatitan dengan proses pembentukan kelompok usaha bersama di desa dawuhan terdapat tiga tahapan yaitu :

1. Tahap persiapan. Tahap ini meliputi penyuluhan sosial dan kegiatan orientasi dan observasi.
2. Tahap pelaksanaan. Tahap ini meliputi penjajakan lokasi dan pemetaan kebutuhan, kemudian bimbingan sosial dasar.
3. Tahap penyerahan bantuan.

Dari ketiga tahapan tersebut semuanya didominasi oleh pemerintah (Kemensos dan Dinas Sosial) hal ini terjadi karena pembentukan kelompok usaha bersama di desa dawuhan adalah sebagai akibat dari program pemberdayaan fakir miskin yang dicanangkan pemerintah pusat atau Kemensos. Mengenai jenis bantuan pada tahap pertama adalah hewan ternak berupa sapi sebanyak 3 ekor untuk masing-masing kelompok yang beranggotakan 10 orang tiap kelompok. Sementara pada pengguliran dana bantuan lanjutan atau Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial pemerintah hanya melakukan pemetaan kebutuhan dan peninjauan lokasi kepada kelompok usaha yang telah terbentuk sebelumnya, sedangkan jenis bantuan adalah berupa dana atau uang sejumlah 30.000.000 rupiah yang disalurkan melalui perbankan dengan syarat kelompok terpilih harus membuat proposal pemanfaatan dana.

Sedangkan menurut Pranarka dalam Prijono (1996) yang mengungkapkan bahwa ada 3 fase penting dalam proses pemberdayaan yaitu :

- 1) **Fase Initial**, semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, oleh pemerintah, dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada fase ini rakyat bersifat pasif melaksanakan apa yang direncanakan pemerintah dan tetap tergantung pada pemerintah.
- 2) **Fase Partisipatoris**, proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian. Kemudian ketika masuk pada fase emansipatoris, proses pemberdayaan ini berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan didukung pemerintah bersama masyarakat.
- 3) **Fase Emansipatoris**, ini masyarakat sudah dapat menemukan kekuatan dirinya sehingga dapat melakukan pembaruan dalam mengaktualisasi diri. Puncak dari kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah ketika berada pada fase emansipatoris, untuk dapat merealisasikan hal ini dibutuhkan adanya dua persyaratan pokok, yaitu persyaratan dalam perencanaan pembangunan dan persyaratan dalam pelaksanaan program pembangunan.

Jika berdasarkan kepada kerangka pemikiran Pranarka diatas mengenai fase didalam pemberdayaan masyarakat, maka proses pembentukan kelompok usaha bersama di desa dawuhan ini adalah tergolong fase initial. Namun dalam masalah ini ada hal lain yang lebih penting sebelum melangkah lebih jauh seperti yang diungkapkan oleh Sulistiyani (2004) bahwa harus ada setidaknya 3 tahap yang harus dilakukan oleh pihak yang memberdayakan dalam hal ini adalah dinas sosial yaitu :

- 1) Tahap kesadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pelaku pemberdayaan menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan kesadaran akan membuka keinginan dan kesadaran masyarakat akan kondisinya saat ini, dan dengan demikian dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat menggali peran dalam pembangunan. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-kecakapan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan dan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi dalam lingkungannya.

Tahap kesadaran atau tahap persiapan yang dilakukan oleh pemerintah setidaknya bisa memberikan pengertian kepada masyarakat miskin sasaran program pemberdayaan fakir miskin di desa dawuhan akan pentingnya

melepaskan diri dari kebiasaan lama yang menyebabkan mereka terikat pada kondisi yang tidak berdaya. Meskipun masyarakat pada awalnya bersikap pasif sesuai dengan kerangka berpikir dari Pranarka dalam Prijono (1996) bukan berarti mereka dalam keadaan tidak sadar, karena jika yang terjadi demikian maka hal tersebut tidak hanya menyulitkan pemerintah karena ketidakberhasilan program, tetapi juga akan berdampak kepada masyarakat di lingkungan sekitar. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini dinas sosial melakukan penyeleksian kembali atas beberapa masyarakat miskin yang telah terhimpun melalui kegiatan pada tahap pelaksanaan yaitu bimbingan sosial dasar dan sosialisasi program.

Sedangkan sebelum menuju pada tahapan yang selanjutnya yaitu pada tahap penyerahan bantuan, penting sekali bagi pemerintah atau dinas sosial untuk menganalisa kembali hasil seleksi dari beberapa tes, baik lisan maupun tulisan yang telah diberikan kepada kelompok binaan sosial yang telah terbentuk apakah kelompok binaan sosial tersebut layak diberdayakan atau dengan kata lain menjadi embrio dari kelompok usaha bersama nantinya atau masih perlu dilakukan bimbingan yang lebih intensif.

Bahwa didalam proses pembentukan kelompok usaha bersama, atau pada fase initial seperti yang telah di ungkapakan oleh Pranarka dalam Prijono (1996), setidaknya pemerintah atau pihak yang memberdayakan memiliki kemampuan menganalisa kondisi pihak yang diberdayakan dalam hal ini kelompok usaha bersama yang telah terbentuk apakah sudah layak diberdayakan atau masih perlu untuk disadarkan. Namun didalam kasus ini bantuan tahap pertama beserta pembentukan kelompok tahap pertama ditujukan untuk menstimulus sasaran



pemberdayaan, hal tersebut sepertinya kurang efektif karena akan menghabiskan banyak biaya, waktu dan tenaga. Namun jika hal ini tidak dilakukan, pemerintah tidak akan pernah tau dengan sebenar-benarnya kelompok mana yang benar-benar layak untuk diberdayakan.

Berkaitan dengan waktu dan tenaga, pada fase initial dan tahap penyadaran seperti yang diungkapkan Pranarka dalam Prijono (1996), bantuan yang bersifat stimulus pada program pemberdayaan fakir miskin atau program tahap pertama akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar hal ini terlihat dari gagalnya 20 dari 30 kelompok usaha bersama yang telah terbentuk didesa dawuhan, hal ini berarti hanya 10 kelompok yang berhasil memenuhi indikator keberhasilan proses pengenalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun sisi positif dari kegiatan ini adalah 10 kelompok terpilih yang kemudian akan menerima bantuan lanjutan telah siap untuk diberdayakan dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimilikinya.

#### **4.3.2 Pengembangan Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama.**

Sebelum menganalisa lebih jauh tentang pengembangan kelembagaan kelompok usaha bersama, sedikit peneliti mengingatkan kepada permasalahan awal, dimana terbentuknya kelompok usaha bersama didesa dawuhan ini adalah sebagai akibat dari program pemberdayaan fakir miskin. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama didesa dawuhan ini bisa dikatakan masih pada proses pembelajaran atau pada proses pengenalan. Seperti yang telah diungkapkan oleh peneliti bahwa substansi dari pembentukan kelompok usaha bersama dan pemberian bantuan

pada tahap pertama adalah sebagai cara atau metode yang digunakan oleh pelaku pemberdayaan atau pemerintah dalam menstimulus kelompok sasaran pemberdayaan dan mempersiapkan mental serta mengenali kemampuan dalam hal ini kelebihan dan kekurangan kelompok sasaran pemberdayaan, maka dalam proses pengembangan kelembagaan kelompok usaha bersama, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan oleh pihak yang memberdayakan atau pelaku pemberdayaan menurut Suharto (1997) dalam Huraerah (2008:89) mengatakan bahwa pelaksanaan proses dalam pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu :

- 1) **Pemungkinan** : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan structural yang menghambat.
- 2) **Penguatan** : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- 3) **Perlindungan** : melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) **Penyokongan** : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan
- 5) **Pemeliharaan** : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Berkaitan dengan pendekatan pemberdayaan diatas sampai saat ini metode yang dijalankan oleh pelaku pemberdayaan dalam hal ini dinas sosial kabupaten adalah penyokongan, perlindungan dan pemeliharaan sementara untuk pemungkinan dan penguatan diserahkan sepenuhnya kepada pendamping lapangan.

Pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh pendamping lapangan dalam hal ini berkaitan dengan kepengurusan, pembagian tugas, administrasi kelompok serta yang terakhir proses pengambilan keputusan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa dalam hal struktur kelompok dan pembagian tugas pada kelompok usaha bersama didesa dawuhan adalah berdasarkan dari buku pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam program pemberdayaan fakir miskin atau program pada tahap pertama yang digunakan hingga sekarang tanpa ada perubahan, hanya saja didalam hal ini beberapa anggota kurang memahami tentang tugas pokok dan fungsinya sehingga pendamping lapangan hanya memaparkan dan menjelaskan beberapa bagian dari pembagian tugas pokok dan fungsi dari buku pedoman, hal ini dimaksudkan agar anggota kelompok dapat memahami dengan baik karena fokus utama mereka adalah peningkatan usaha ekonomi produktif. Sedangkan untuk kepengurusan terjadi beberapa perubahan dikarenakan ada anggota baru yang masuk dan anggota yang keluar.

Kemudian yang kedua adalah administrasi kelompok usaha bersama. berkaitan dengan administrasi kelompok dari hasil penelitian menyebutkan bahwa beberapa buku atau catatan penting yang dimiliki oleh sebagian besar kelompok usaha bersama di desa dawuhan adalah buku kas, buku anggota dan buku laporan

perkembangan hasil usaha ekonomi produktif. Sedangkan didalam buku panduan program pemberdayaan fakir miskin di jelaskan bahwa setiap kelompok usaha bersama harus mempunyai :

1. Buku Rencana Kegiatan
2. Kartu Perkembangan Kesejahteraan Anggota KUBE
3. Buku Penerimaan Bantuan KUBE
4. Buku Kas
5. Buku Perkembangan dan Hasil UEP
6. Buku Tamu dan Buku Anggota

Keterbatasan kemampuan dari sebagian besar bendahara dan sekertaris kelompok usaha bersama didesa dawuhan dalam hal baca tulis merupakan alasan utama yang dijadikan penyebab kurangnya buku administrasi kelompok. Namun berdasarkan observasi peneliti hal tersebut bukan merupakan “kurangnya” akan tetapi “pengurangan” yang dilakukan oleh pendamping lapangan dan tentunya dengan persetujuan anggota kelompok usaha bersama itu sendiri. Pengurangan ini bertujuan untuk mempermudah atau melatih anggota agar terbiasa dalam urusan catat-mencatat atau pembukuan atau administrasi kelompok. Sehingga pada perkembangannya sampai saat ini kelompok usaha bersama didesa dawuhan yang terpilih mendapatkan bantuan langsung pemberdayaan sosial sudah memiliki semua buku seperti yang tertera pada buku panduan.

#### **4.3.3 Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama**

Seperti pada pengembangan kelembagaan kelompok usaha bersama maka sabelum menjalankan kegiatan usaha ekonomi produktif sangat penting kiranya pihak yang diberdayakan atau dalam hal ini kelompok usaha bersama didesa dawuhan memahami tentang sistem yang digunakan didalam pengelolaan usaha ekonomi produktifnya agar tidak terjadi kesalahpahaman baik antara pihak yang

memberdayakan dan yang diberdayakan maupun antar sesama pihak yang diberdayakan.

Berdasarkan telaah peneliti dari penjelasan yang diperoleh dalam wawancara kepada beberapa anggota kelompok usaha bersama yang tidak mendapatkan bantuan tahap kedua atau pada tahap bantuan langsung pemberdayaan sosial adalah bahwa mereka menganggap sistem yang diterapkan terlalu rumit, mereka tidak memahami tentang indikator keberhasilan kelompok usaha bersama atau dengan kata lain mereka sama sekali tidak memahami tentang adanya adanya bantuan lanjutan yang akan diberikan pemerintah jika mereka berhasil mengembangkan modal awalnya.

Memang pada dasarnya program pemberdayaan fakir miskin, seperti yang dijelaskan oleh pemerintah atau pihak dari dinas sosial bahwa program yang pertama ini bersifat percobaan, bahwa jika program yang pertama berhasil maka akan ada program asistensi selanjutnya namun permasalahannya disini adalah mengapa sebagian besar masyarakat sasaran program tidak mampu memahami hal tersebut. Sementara itu berdasarkan data yang diperoleh peneliti hanya 10 dari 30 kelompok usaha bersama yang berhasil mengembangkan usaha ekonomi produktifnya hingga mencapai penambahan 30% dari modal awal atau berada pada kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal diatas menunjukkan adanya dua kemungkinan yang pertama adalah kesadaran sebagian kelompok sasaran program masih perlu untuk dibangkitkan atau pemerintah yang bersikap kurang terbuka kepada kelompok sasaran program atau dengan kata lain

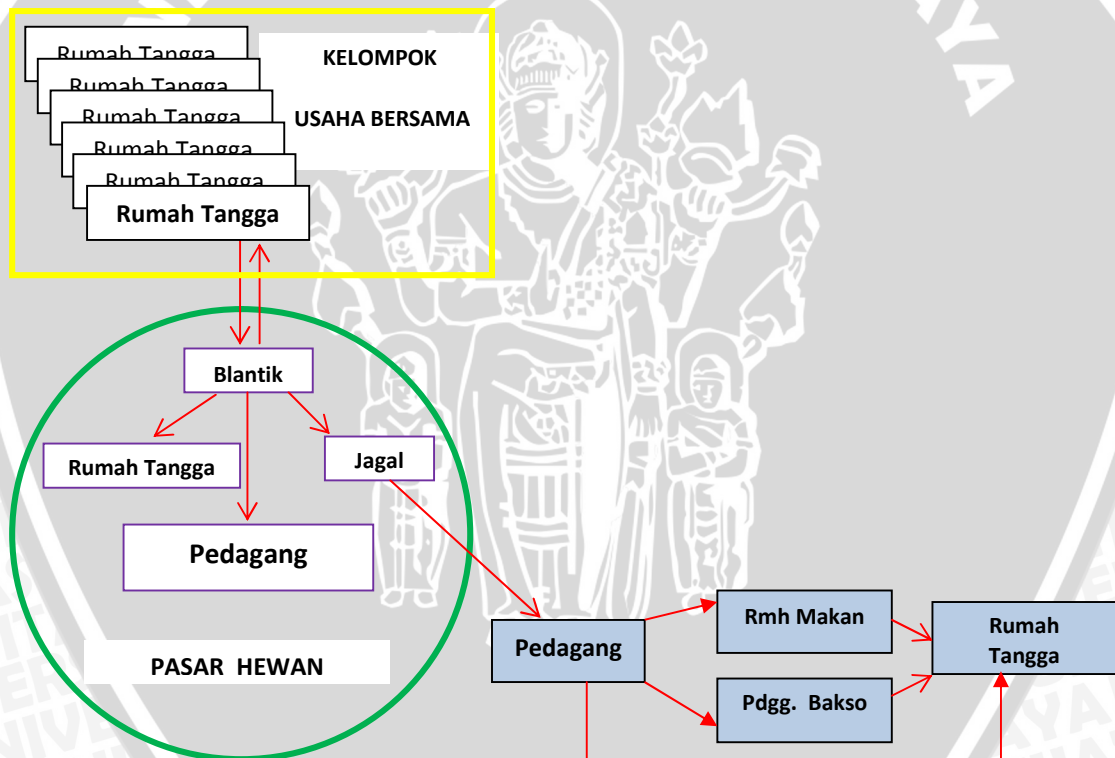
pemerintah memiliki *hidden agenda* berkaitan dengan program pemberdayaan fakir miskin ini.

Kemudian yang kedua adalah mengenai pengembangan keterampilan teknis dan manajerial. Usaha peternakan sapi oleh kelompok usaha bersama di desa dawuhan masih diusahakan dengan cara pemeliharaan secara tradisional. Hal ini tergambar dari ciri-ciri usaha peternakan peternak responden yang sebagian besar sesuai seperti apa yang diungkapkan oleh Diwyanto dkk (1995) yang dikutip Wirosuhardjo dan Priyanti (1997) bahwa usaha peternakan bersifat sambilan adalah usaha yang dicirikan oleh skala pengusahaan ternak yang relatif kecil, input biaya produksi yang relatif rendah, kurang berorientasi ekonomi, serta bentuk usahanya bersifat pembibitan dan pembesaran. Lebih lanjut Wirosuhardjo dan Priyanti (1997) menjelaskan bahwa sistem usaha seperti tersebut belum memperhitungkan semua faktor input produksi seperti curahan tenaga kerja, keluarga, pakan (rumput) dan sewa lahan untuk bangunan kandang. Pemasaran produksi juga belum berdasarkan target penjualan, akan tetapi pada umumnya lebih ditentukan oleh kebutuhan akan uang tunai.

Gambaran seperti tersebut diatas ditunjukkan dari. Sementara itu didalam perkembangannya kelompok usaha tingkat penguasaan sapta usaha peternakan antara lain, pengetahuan tentang bibit, pengetahuan tentang pakan ternak, sistem pemeliharaan, cara pengembangbiakan ternak, pengetahuan tentang sistem perkandangan dan peralatan, pengetahuan tentang tatacara pencegahan penyakit, dan pola penanganan pasca panen dan pemasaran, serta jumlah ternak (Skala Usaha)bersama didesa dawuhan penguasaan sapta usaha peternakan masih sebatas

pengetahuan tentang bibit, pakan ternak, sistem pemeliharaan dan cara pengembangbiakkan ternak, sedangkan untuk sistem peralatan dan perkandangan dan pencegahan penyakit masih dalam tahap pendidikan atau pelatihan yang masih sedang dijalankan oleh pendamping lapangan dan beberapa pihak lain dari dinas peternakan serta bantuan dari LSM setempat.

Kemudian yang ketiga adalah peluang pasar, jika diamati maka transaksi yang dilakukan kelompok usaha bersama di desa dawuhan dalam memasarkan hasil usaha ekonomi produktifnya akan tampak seperti gambar berikut



Gambar 4.3.3 : Pemasaran Hasil Usaha Ekonomi Produktif KUBE Di Desa Dawuhan  
 Sumber : Hasil Olah Peneliti

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pemasaran hasil usaha ekonomi produktif sebatas pada lingkup pasar hewan (blantik sapi), jadi disini blantik sapi yang menentukan harga jual dan harga beli. Hal ini sangat disayangkan karena

jika kelompok usaha bersama didesa dawuhan memiliki akses langsung dan dapat melakukan transaksi penjualan hasil usaha ekonomi produktifnya dengan jagal dan pedahgang bakso atau rumah makan misalnya, maka keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. Lebih dalam daripada itu, modal dan kesempatan mereka untuk mengembangkan usaha ekonomi preproduktifnya akan semakin besar.

Sementara ini usaha yang dilakukan oleh pendamping lapangan adalah kemitraan. Kegiatan yang menjalin kerjasama dengan berbagai pihak selain pemerintah misalnya tokoh masyarakat yang memiliki modal dan dinas peternakan akan sangat membantu memfasilitasi atau memberikan akses kepada kelompok usaha bersama agar bisa bersaing memasarkan produk hasil dari usaha ekonomi produktif mereka.

Kemudian yang terakhir adalah tabungan anggota, secara bertingkat, keberdayaan masyarakat menurut Susiladiharti (2002) dalam Huraerah (2008:90) dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*).
- 2) Tingkat keberdayaan kedua adalah penguasaan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan.
- 3) Tingkat keberdayaan yang ketiga adalah dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dilingkungannya.
- 4) Tingkat keberdayaan keempat adalah kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
- 5) Tingkat keberdayaan yang kelima adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkatan ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan.

Berdasarkan pendapat dari Susiladiharti (2002) diatas bahwa ada 5 tingkat keberdayaan yang terpenting adalah terpenuhinya kebutuhan dasar atau *basic*



*needs*. Dalam hal ini penting sekali untuk mengetahui apa saja yang dimaksud kebutuhan dasar tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Maslow bahwa ada tiga kebutuhan dasar yaitu, makanan dan minum, tempat tinggal dan pakaian dan kemudian seks.

Dari ketiga kebutuhan dasar tersebut makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap harinya atau didalam ilmu ekonomi biasa kita sebut sebagai konsumsi. Didalam rumus ekonomi pendapatan sama dengan konsumsi, dalam rumus ini berarti berapapun pendapatan yang dihasilkan sama dengan pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi.

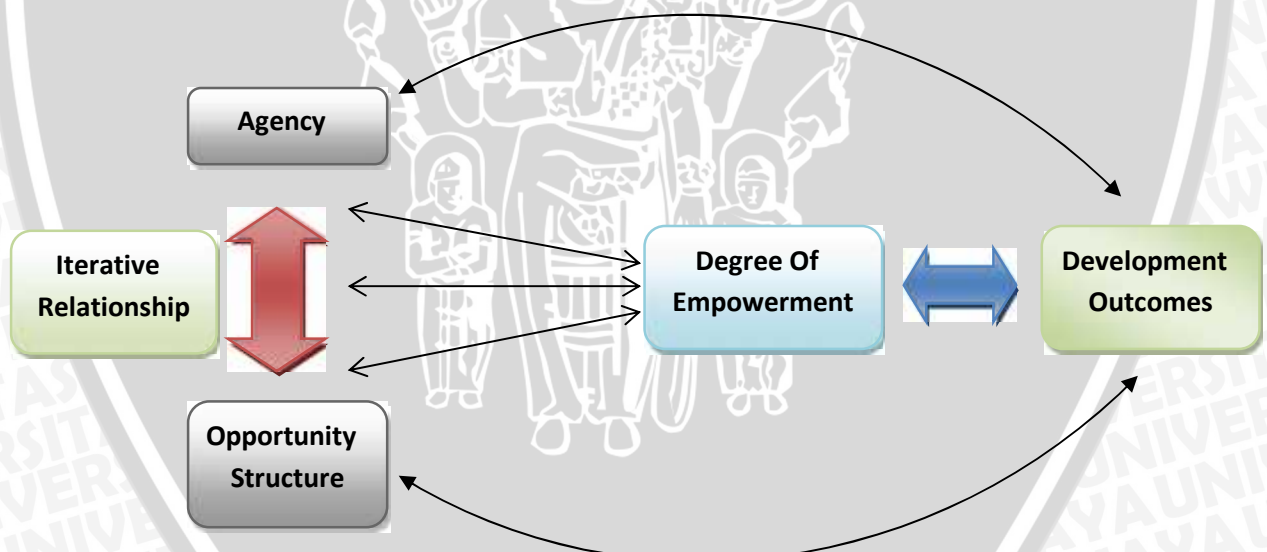
Sedangkan pemilahan kebutuhan dasar diatas merubah konsep tersebut, menjadi pendapatan sama dengan konsumsi atau pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan sisanya bisa di gunakan untuk keperluan lain misalnya tabungan atau investasi yang biasa disingkat di dalam rumus  $Y = C + S$ ,  $Y$  adalah pendapatan,  $C$  adalah konsumsi (*Concumption*) dan  $S$  (*Saving*) adalah tabungan dan  $Y = C + S + I$  dimana  $I$  (*Investation*) adalah Investasi.

Sedangkan fokus utama pendidikan mengenai tabungan untuk kelompok usaha bersama didesa dawuhan sementara ini masih diperuntukkan untuk anggota, dimana berdasarkan pengamatan peneliti kesadaran akan menabung sangat kurang atau dengan kata lain mereka menabung karena terpaksa dengan aturan yang ada didalam kelompok usaha bersama. Hal ini tentunya akan mempersulit mereka didalam mengembangkan usaha ekonomi produktif kelompoknya, karena untuk menganalisa kebutuhan dasar masing-masing individu mereka atau beberapa

anggota kelompok usaha bersama didesa dawuhan masih mengalami kesulitan sedangkan kebutuhan dasar kelompok dan tabungan kelompok adalah hal yang berbeda dengan tabungan individu serta kebutuhan dasar individu.

#### 4.3.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Proses Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kelompok pada dasarnya dipengaruhi oleh 2 faktor utama yaitu *agency* (kelompok itu sendiri) dan *opportunity structure* (semua aspek institusional yang dapat mempengaruhi individu atau organisasi tersebut untuk berpartisipasi dalam pembangunan), seperti yang dijelaskan oleh Alsop et al (2006) yang diambil dari teori sosial Giddens (1984) dalam gambar dibawah ini



Gambar 4.3.4 : Hubungan Antara Partisipasi Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat.

(Sumber: Alsop et al., 2006)

Kedua faktor tersebut oleh peneliti disederhanakan ke dalam 2 faktor yang pertama faktor internal yang meliputi anggota kelompok usaha bersama dan pendamping lapangan kemudian yang kedua faktor eksternal yang meliputi

institusi pemerintah dan lingkungan sosial.

#### a. Faktor Internal

Faktor internal yaitu anggota kelompok usaha bersama dan pendamping lapangan merupakan variabel bebas didalam pemberdayaan masyarakat miskin di desa dawuhan. Hal ini berarti bahwa didalam proses pemberdayaan melalui kelompok usaha bersama anggota kelompok usaha bersama didesa dawuhan beserta pendamping yang lebih berdominan menentukan berhasil atau tidaknya proses pemberdayaan tersebut. Sangat penting kiranya untuk mengetahui lebih dalam tentang perilaku sosial dari anggota kelompok usaha dan pendamping lapangan itu sendiri.

Berdasarkan pengamatan peneliti dari beberapa anggota kelompok usaha bersama yang termasuk kedalam indikator berhasil bahwa mereka memiliki komitmen untuk merubah nasib untuk tidak miskin serta mampu bekerjasama dan beradaptasi dengan baik apakah itu dengan kelompok maupun dengan individu. Kartasmita (1997:10) mengungkapkan bahwa seseorang dikatakan miskin absolut apabila tidak mampu membiayai kebutuhan yang paling minimal untuk dapat hidup sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah perbandingan antara kelompok pendapatan masyarakat, yaitu antara kelompok yang miskin dan kelompok yang tidak miskin, karena mempunyai tingkat pendapatan yang relatif tinggi daripada garis kemiskinan dan merupakan kelompok masyarakat yang relatif lebih maju.

Kondisi masyarakat didesa dawuhan berdasarkan pendapat dari Kartasmita diatas adalah termasuk kedalam kemiskinan relatif, artinya

kemiskinan bisa terlihat karena adanya pembanding. Sedangkan untuk beberapa anggota kelompok usaha bersama didesa dawuhan terjadinya kemauan untuk merubah nasib dikarenakan dengan adanya pembanding tersebut, dan beberapa diantaranya ada yang apatis dan adapula yang menganggap mereka tidak termasuk dala kategori miskin dengan kata lain mereka terbebas dari kemiskinan absolut. Sedangkan untuk tingkat pendidikan tidak terlalu besar pengaruhnya didalam proses pemberdayaan di desa dawuhan, karena perilaku mereka lebih besar didasarkan kepada lingkungan sosial daripada pengetahuan individu.

#### **b. Faktor Eksternal**

Kemudian faktor eksternal disini adalah institusi atau lembaga pemerintah dan lingkungan sosial baik didalam desa dawuhan maupun diluar desa dawuhan. Peran penting dari institusi pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah bukan hanya sebagai fasilitator tetapi juga sebagai pihak yang melindungi karena pemberdayaan seperti yang dikungkapkan oleh Kartasasmita (1997:11-12) dalam Huraerah (2008:87-88) memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Oleh karena itu pemerintah juga harus memperhatikan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat sasaran dari pemberdayaan tersebut, jika dalam hal ini

pemerintah memiliki keterampilan dan kepekaan untuk menanungi kelompok usaha bersama didesa dawuhan maka anggota kelompok akan membuka dirinya untuk dapat terlepas dari perangkap kemiskinan bukan hanya kemiskinan bahkan akan mampu melepaskan diri dari keterbelakangan, sebagai contoh misalnya untuk pendamping lapangan didapati peneliti bahwa didalam peraturan yang telah tertera didalam program pemberdayaan fakir miskin dan bantuan langsung pemberdayaan sosial (P2FM-BLPS) tidak diperbolehkan untuk mengangkat pendamping yang berasal dari instansi pemerintah namun untuk kasus didesa dawuhan berbeda justru pengangkatan pendamping lapangan diambil dari pegawai desa, hal ini dikarenakan pegawai desa memiliki nilai-nilai positif yaitu pengetahuan yang cukup luas mengenai kondisi sosial dan budaya didesa dawuhan dibandingkan dengan beberapa calon yang telah disiapkan oleh LSM setempat.

Aziz (2005:135) dalam Huraerah (2008:88) merinci tahapan strategi yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya
- 2) Melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara partisipatif. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompok-kelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara periodic (terus-menerus)
- 3) Menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih setiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan.
- 4) Mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat.
- 5) Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
- 6) Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya

Sedangkan untuk proses pemberdayaan masyarakat miskin melalui

kelompok usaha bersama didesa dawuhan yang mampu dilaksanakan instistusi atau lembaga pemerintahan dalam hal ini dinas sosial adalah point 1-4 dan sejauh ini hal tersebut memberikan pengaruh yang positif kepada kelompok usaha bersama didesa dawuhan hal tersebut bisa terlihat dari keberhasilan yang dicapai oleh kelompok usaha bersama dalam beberapa tahun terakhir.

Selanjutnya adalah lingkungan sosial baik didalam maupun diluar desa dawuhan. Berbicara mengenai lingkungan sosial ada tiga kendala utama dalam upaya memberdayakan rakyat desa miskin agar dapat dientaskan dari lembah kemiskinan, kendala tersebut adalah kendala yang bersifat fisik alamiah, structural-kultural, dan sistemik (Mubyarto dkk : 1994).

Kendala fisik alamiah adalah rintangan-rintangan yang bersifat fisik yang sudah “terwarisi’ pada suatu daerah tertentu seperti keadaan tanah yang kering, berbukit-bukit, dan sulit air. Untuk mengatasi permasalahan yang seperti ini sebenarnya relatif mudah, karena yang dibutuhkan adalah teknologi, dan itu berarti dana. Akan tetapi pemberian dana atau teknologi pasti tidak menyelesaikan segala-galanya, sebab sebelum dan setelah pemberian dana tentu ada persoalan-persoalan yang bersifat non-fisik (sosio-kultural) yang tidak sesederhana bentuk dan cara penyelesaiannya. Persoalan-persoalan semacam itulah yang pasti akan muncul yang dipat dikatakan mempunyai sifat struktural-kultural.